

# Dewan Ngaku Siap Dikerangkeng

## Pj Bupati dan Sekda Kembali Sarankan Konsultasi

**MANGUPURA** - Kendati sudah berulang melakukan rapat dan konsultasi hingga ke Mendagri, pencairan dana hibah dewan di Kabupaten Badung masih mengalami tarik ulur. Kemarin (30/9), pimpinan dewan mengadakan rapat kerja (raker) dengan Penjabat Bupati (Pj) Badung, Nyoman Hary Yudha Saka.

Rapat berlangsung di ruang Ketua DPRD Badung, Nyoman Giri Prasta itu dari awal langsung memanas. Sebanyak 13 anggota dewan yang hadir langsung "menguliti" eksekutif yang dipimpin Pj Bupati serta Sekda Kompyang R Swandika.

Saking panasnya rapat, salah seorang anggota dewan Nyoman Sentana siap dikerangkeng demi pencairan hibah. Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria mengawali ajang "pembantaian" eksekutif. Satria menggebu-gebu menanyakan syarat berbadan hukum bagi pencairan dana hibah. Selama ini syarat berbadan hukum dinilai tidak jelas. "Yang dimaksud berbadan hukum itu harus ada surat dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi atau notaris. Tolong ini dipertegas," pinta Satria.

Satria menyebut, sebagai wakil rakyat sudah berusaha sekuat tenaga mendapat penjelasan terutama yang berbadan hukum.

**Saya siap dikerangkeng demi rakyat. Khusus untuk hari ini saja Pak, tolong cairkan. Kedepan tidak usah. Ini sudah kadung ngedig kulkul (terlanjur membunyikan kentongan) masyarakatnya."**

**NYOMAN SENTANA**

Anggota Komisi IV

Misalnya bantuan untuk pura, banjar dan kelompok-kelompok ternak, lembaga adat, banjar adat serta subak. "Mohon dicarikan solusi terbaik. Selama ini kami memang sedikit galau, karena hibah belum cair. Biar kami tidak ngambang. Karena yang jadi sasaran kritik itu adalah kami," imbu Satria.

Anggota Komisi IV, Nyoman Sentana bahkan mengaku siap berurusan dengan hukum kalau hibah ini dikorupsi dewan. "Saya siap dikerangkeng demi rakyat. Khusus untuk hari ini saja pak, tolong cairkan. Kedepan tidak usah. Ini sudah kadung ngedig kulkul (terlanjur membunyikan kentongan) masyarakatnya," ujar Sentana, merengek.

Sementara itu, kritikan pedas juga dilontarkan Nyoman Mesir. Mantan Perebikel Kutuh, Kuta Selatan ini langsung mempertanyakan seolah-olah dewan tidak becus bekerja. "Kami jangan ditakut-takuti.

Memangnya hibah ini dimakan oleh DPR. Kami ini disebut terhormat, tapi faktanya tidak lebih seperti tomat," cetus Mesir.

Mesir menilai syarat berbadan hukum untuk banjar adat, desa adat dan subak tidak masuk akal. Menurutnya hibah ini hanya disalurkan oleh DPRD. Sedangkan esekusinya ada di esekutif. "Di Badung saja yang belum beres. Hibah induk saja belum cair. Sebelumnya kami dapat angin segar karena Pemprov menjanjikan hibah bisa cair, tapi sekarang tidak. Kami minta ketegasan," sodoknya.

Tidak kalah pedas, Ketua Komisi II Nyoman Dirga Yusa mengatakan, sebagai kabupaten terkaya di Bali, uang Badung itu adalah wujud dari pariwisata. Pariwisata itu sumbernya adalah adat. Tapi, kenapa begitu memberikan bantuan kepada adat diganjal. Pihaknya mengaku punya beban psikologi terkait ngadatnya hibah ini. Sekda Kompyang R Swandika yang hadir mendampingi Pj bupati sempat memberi penjelasan bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar hibah ini bisa cair. (san/rid)



## Kadis P2 Bangli akhirnya Tersangka

DENPASAR - Setelah kasus korupsi Kelompok Tani Ternak Bina Winangun, Desa Batur Tengah, Kintamani, dengan terdakwa Nyoman Juniada, 40, sebagai ketua kelompok disidangkan, kini ada perkembangan menarik. Kadis Pertanian Perkebunan dan Perhutanan (P3) Wayan Supartana, yang saat ini jadi Kadis P2 (Perikanan dan Peternakan) Bangli, akhirnya juga menjadi tersangka.



ARI TEJAJ/RADAR BALI

Wayan Supartana

Ketua Tim Teknis

Wayan Sadia juga terungkap terima uang Rp 34 juta. Fakta ini terungkap dalam persidangan yang dipimpin hakim Beslin Sihombing, dengan jaksa Bagus Agung, Nyoman Juniada yang didampingi pengacaranya I Made Suardika Adnyana.

► Baca Kadis... Hal 31

## Pengacara Minta Pemeriksaan Terpisah

### ■ KADIS

Sambungan dari hal 21

mengungkapkan bahwa Supartana yang sebelumnya jadi saksi di perkara dengan kerugian negara Rp 340 juta tersebut akhirnya jadi pesakitan juga. "Mohon maaf, kalau bisa pemeriksaan saksi Kadis dipisahkan majelis. Lantaran sudah menjadi tersangka dalam kasus ini," jelas Suardika.

Di kesempatan ini Sadia ter-

kuak meminta uang ke terdakwa Rp 34 juta, ketika pencairan dana tahap pertama. Hakim Beslin juga sempat beberapa kali menghardik saksi - saksi lantaran banyak berkelit. "Anda sebagai tim teknis kok mengaku tidak tahu apa - apa. Kok, bisa?" hardik Beslin.

Ketika Supartana menjadi saksi, langsung ditanyakan terkait dengan uang Rp 34 juta yang diambil Widia ke terdakwa. "Setelah uang cair, Widia

mengambil uang Rp 34 juta. Dengan alasan untuk dibagi - bagi. Apakah Bapak dapat?" tanya hakim.

Saat itu dengan wajah merah Supartana menggeleng sambil mengaku tidak tahu dan tidak ada. "Saya tidak tahu menahu, tidak ada saya dapat bagian," kilahnya.

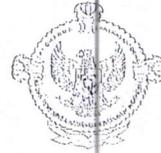
Usai sidang pengacara terdakwa memastikan memang Kadis Supartana sudah menjadi tersangka. "Karena memberikan rekomendasi pencairan Kadis

Supartana juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Selain itu Sadia juga terungkap meminta uang ke terdakwa Rp 34 juta," urainya.

Seperti diketahui, kasus ini menyeruak karena permainan ketua kelompok tani ternak berdasarkan SK Kepala Desa Batur, Nomor 03 Tahun 2006. Namun, dalam penerapannya ada permainan yang merugikan negara sebesar Rp 340 juta. (art/pit)

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal. : 21 dan 31



## KORUPSI PUPUK

### Kadishutbun Diperiksa, Kerugian Rp 490 Juta

AMLAPURA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura, sudah mendapatkan informasi kerugian Negara akibat dugaan penyelewengan pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Karangasem tahun 2013. Kejari Amlapura mendapatkan bocoran dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa kerugian akibat dugaan korupsi tersebut tembus Rp 490 juta. Melihat anggaran pengadaan pupuk yang mencapai Rp 800 juta, berarti lebih dari separo diduga dikorupsi. "Resminya belum kami terima, baru sebatas lisan. Kerugian sebesar Rp 490 juta," ujar Kajari Amlapura, Ivan Jaka MW, dihubungi Rabu (30/9).

Siapa menikmati uang itu? "Masih kami dalam keterangan tersangkanya," jelasnya. Sebagaimana diketahui, untuk mengusut kasus tersebut, penyidik Kejari Amlapura sudah menetapkan dua orang tersangka. Yakni rekanan, Hamdani, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Karangasem I Komang Subratayasa. Dimana, saat pengadaan pupuk, Subratayasa masih menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Karangasem.

Pada kesempatan kemarin, tersangka Subratayasa kembali diperiksa penyidik Kejari Amlapura. Dia diperiksa selaku tersangka. Pemeriksaan kemarin terkait tugas-tugasnya saat pengadaan pupuk tahun 2013. Ivan Jaka mengakui, pemeriksaan kemarin cukup lama, yakni sekitar 5 jam. Karena ada banyak hal harus didalami. Subratayasa, tercatat mulai diperiksa sekitar pukul 10.00-15.00. Kabarnya, Subratayasa, sampai tidak sempat istirahat makan siang. "Sudah kesepakatan penyidik dengan tersangka. Sama-sama tidak ada istirahat," ujar salah seorang penyidik. Kapan pemeriksaan tersangka Hamdani? Dengan tegas, Ivan Jaka mengatakan bahwa pemeriksaan tersangka Hamdani, masih dijadwalkan. "Tersangka HD (Hamdani) masih dijadwalkan," pungkas Ivan Jaka kepada *Jawa Pos Radar Bali*. (wan/gup)

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal. : 25